

MEMBINGKAI KEBHINEKAAN DAN KEDAULATAN DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA DARI SUDUT PANDANG SOSIAL POLITIK NASIONAL

Tappil Rambe¹⁾

¹⁾Jurusan Pendidikan Sejarah, FIS, Unimed. Email:tappilrambe@gmail.com

ABSTRAK

Kerukunan Umat Beragama, dimulai dari komitmen yang kuat dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama untuk membendung intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Komitmen tersebut tampak dari Sembilan prioritas program (Nawacita), di antaranya adalah melakukan Revolusi Mental Karakter Bangsa (Nawacita Nomor 8), serta Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Nawacita Nomor 9). Khusus Nawacita memperteguh kebhinnekaan adalah dengan mewujudkan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika agar tercipta kerukunan antar warga dalam wadah NKRI.

Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang harus selalu dijaga, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. empat konsensus dasar bernegara itu memiliki ruang lingkup sangat luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus senantiasa kita re-aktualisasi karena kehidupan kita senantiasa berkembang dan dinamis.

Kebhinnekaan dan kedaulatan idealnya menjadi identitas dari setiap sikap dan perilaku politik nasional. Identitas sosial politik nasional menjadi urgen dalam rangka menyemai kedamaian mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Kata kunci : Kebhinnekaan, kedaulatan, sosial politik

I. PENDAHULUAN

Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri bangsa (founding fathers) telah berjuang membangun konsensus bersama untuk memberikan “Bangunan dan jiwa” dari negara yang akan baru lahir di bumi Nusantara. Setelah melalui dialog yang sangat panjang dalam dinamika ideologisasi, akhirnya disepakati pondasi dasar dari negara yang baru lahir tersebut adalah;

Pancasila, UUD Negara Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Seiring perjalanan waktu, kesepakatan para pendiri bangsa itu disebut sebagai 4 (Empat) Konsensus Nasional.

Dilihat dari jejak sejarahnya, pondasi ideologi berbangsa dan bernegara tersebut telah melalui sejumlah tantangan dan ancaman. Salah satunya gerakan separatis yang selalu muncul dari waktu ke waktu,

mulai dari DI/TII dan RRI/Permesta, di masa lalu, hingga RMS dan OPM, di masa kini. Saat ini, di tengah munculnya Politik Identitas yang mengarah pada kontra ideologi bangsa, segenap masyarakat Indonesia diharapkan mampu melakukan penyegaran kembali, untuk mengenali dan memahami landasan ideologi bangsa yang akhir-akhir ini terasa mulai luntur, dan bahkan cenderung kehilangan makna.

Masyarakat berperan aktif mengambil bagian menolak paham baru atau paham lain yang akan menciptakan kekacauan ideologi yang pada gilirannya membahayakan stabilitas keamanan yg merupakan bagian penting keberhasilan pembangunan nasional. Penyebab munculnya radikalisme dan terorisme kecuali pengaruh lingkungan global, euphoria kebebasan yang berlebihan, penegakan hukum yang kurang kuat, juga sangat dipengaruhi oleh disparitas ketimpangan sosial ekonomi yang belum terselesaikan. Tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan sifatnya sudah multidimensi karena ancaman dapat

bersumber dari ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Kerukunan Umat Beragama, semua kita harus memiliki komitmen yang kuat dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama untuk membendung intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Komitmen tersebut tampak dari Sembilan prioritas program (Nawacita), di antaranya adalah melakukan Revolusi Mental Karakter Bangsa (Nawacita Nomor 8), serta Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Nawacita Nomor 9). Khusus Nawacita memperteguh kebhinnekaan adalah dengan mewujudkan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika agar tercipta kerukunan antar warga dalam wadah NKRI.

Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang harus selalu dijaga, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. empat konsensus dasar bernegara itu memiliki ruang lingkup sangat luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus senantiasa kita reaktualisasi karena kehidupan kita

senantiasa berkembang dan dinamis. saat ini sosialisasi konsensus itu memiliki tingkat urgensi makin tinggi karena masyarakat terus berkembang, terlebih di era globalisasi yang tanpa batas atau borderless seperti sekarang ini.

NKRI merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Meski terdiri dari latar belakang yang beragam, namun dapat bersatu. Karena itu, konsepsi Bhinneka Tunggal Ika adalah bagaimana keragaman disikapi dengan penuh kearifan. Menjaga persatuan Indonesia adalah menjaga keragaman itu sendiri. Karena keragaman adalah sunatullah, keragaman tidak hanya untuk saling mengisi namun juga dapat menjadikan kita lebih arif dan memperluas perspektif kita. Jika mengacu pada keempat pilar tersebut, sudah seharusnya masyarakat Indonesia tidak lagi mempermasalahkan perbedaan agama, ras, suku, golongan, bahasa, kelompok, dan lain sebagainya.

II. KEBHINNEKAAN

Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan

yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu paham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Membiarkan setiap entitas yang menunjukkan ke-berbedaan tanpa peduli adanya common denominator pada keanekaragaman tersebut. Dengan paham pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman. Demikian pula halnya dengan paham multikulturalisme. Masyarakat yang menganut paham pluralisme dan multikulturalisme, ibarat ongkongan material bangunan yang dibiarkan teronggok sendiri-sendiri, sehingga tidak akan membentuk suatu bangunan yang namanya rumah.

Pluralitas adalah sifat atau kualitas yang menggam-barkan keanekaragaman; suatu pengakuan bahwa alam semesta tercipta dalam keaneka ragaman. Sebagai contoh bangsa Indonesia mengakui bahwa Negara-bangsa Indonesia bersifat pluralistik, beraneka ragam ditinjau dari suku-bangsanya, adat budayanya, bahasa ibunya, agama yang dipeluknya, dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu kenyataan atau keniscayaan dalam kehidupan

bangsa Indonesia. Keaneka ragaman ini harus didudukkan secara proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dinilai sebagai asset bangsa, bukan sebagai faktor penghalang kemajuan. Perlu kita cermati bahwa pluralitas ini merupakan sunnatullah.

Seperti dikemukakan di atas, pola sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi keaneka-ragaman ini berdasar pada suatu sasanti atau adagium “**Bhinneka Tunggal Ika,**” yang bermakna beraneka tetapi satu, yang hampir sama dengan motto yang dipegang oleh bangsa Amerika, yakni “**e pluribus unum.**” Dalam menerapkan pluralitas dalam kehidupan, bangsa Indonesia mengacu pada prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa yang diutamakan adalah kepentingan bangsa bukan kepentingan individu, berikut frase-frase yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras.

Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka membentuk kesatuan dari keaneka ragaman tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen bangsa. Suatu contoh di negara tercinta ini terdapat begitu aneka ragam agama dan kepercayaan.

Dengan ke-tunggalan Bhinneka Tunggal Ika tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru. Setiap agama diakui seperti apa adanya, namun dalam kehidupan beragama di Indonesia dicari common denominator, yakni prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yang memiliki kesamaan, dan common denominator ini yang kita pegang sebagai ke-tunggalan, untuk kemudian dipergunakan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Demikian pula halnya dengan adat budaya daerah, tetap diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Fahaman Bhinneka Tunggal Ika, yang oleh Ir Sujanto disebut sebagai fahaman Tantularisme, bukan fahaman sinkretisme, yang mencoba untuk mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur yang datang dari luar.

2. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif; hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan

merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan dengan tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.

3. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun. Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman ini dapat dipersatukan.

4. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi

dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.

Suatu semboyan yang sejak dahulu dikenal dan melekat dengan jati diri bangsa Indonesia adalah “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan tersebut terukir kokoh dalam cengkraman Burung Garuda yang merupakan lambang bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhineka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, yaitu bangsa yang mempunyai keanekaragaman, baik dalam aspek suku bangsa, budaya, ras dan agama.

Keanekaragaman suku, budaya, ras dan agama yang ada pada diri bangsa Indonesia merupakan keunggulan sekaligus tantangan. Kebhinnekaan merupakan kekuatan dan kekayaan sekaligus juga merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu sangat terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam

rangka menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, seperti dewasa ini kita sedang menghadapi dan berupaya memecahkan serta mengakhiri krisis multi dimensional dan krisis ekonomi yang sudah berlangsung cukup lama. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan visi dan misi dari seluruh bangsa Indonesia mustahil kita dapat keluar dari krisis tersebut.

Kebhinnekaan berupa sifat nyata bangsa Indonesia yang sering kita banggakan namun sekaligus juga sering kita prihatinkan. Hal ini dikarenakan mengatur masyarakat yang heterogen jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengatur masyarakat homogen. Masyarakat yang heterogen tentu mempunyai cita-cita, keinginan dan harapan yang jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan masyarakat homogen.

Kebhinnekaan dapat menjadi tantangan atau ancaman, karena dengan adanya kebhinnekaan tersebut mudah membuat orang menjadi berbeda pendapat yang pada akhirnya dapat lepas kendali, memiliki rasa kedaerahan atau

kesukuan yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi atau persatuan dan kesatuan bangsa. Kebhinekaan atau keanekaragaman atau bahkan yang sering disebut dengan multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut.

Kebhinekaan bangsa Indonesia dilatarbelakangi oleh jumlah suku-suku bangsa di Indonesia yang sangat banyak, dimana setiap suku bangsa tersebut mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut sensus BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2016, jumlah suku bangsa di Indonesia lebih dari 300 suku bangsa atau kelompok etnik, atau lebih tepatnya mencapai 1.340 suku bangsa atau kelompok etnik. Hal ini

dapat diartikan jika masing-masing suku bangsa tersebut memiliki tradisi sosial budaya masing-masing, berarti di Indonesia ada dan berkembang bermacam-macam budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Contoh dalam bidang bahasa, dimana setiap daerah mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa daerah orang Jayapura akan berbeda dengan bahasa orang Dayak. Menurut peta bahasa yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Depdiknas tahun 2016, ada lebih dari 746 bahasa daerah di seluruh wilayah Nusantara bahkan bila dilihat dari segi dialek, maka jumlahnya akan jauh lebih banyak lagi, misalnya di Papua saja ada sekitar 185 dialek bahasa lokal.

III. MANAJEMEN SOSIAL KEBHINEKAAN DI INDONESIA

Konsep "bangsa yang satu" yang dipopulerkan sejak Soekarno dalam prakteknya telah berlangsung dengan strategi yang represif, yang pada masa Soeharto diterjemahkan melalui politik "asas tunggal" menekankan homogenitas masyarakat. Prinsip asas tunggal

selain memperlihatkan suatu proses penundukan berbagai kekuatan masyarakat kepada satu prinsip sosial politik, juga memperlihatkan konsepsi negara tentang hubungan kekuasaan antara negara dan rakyat. Rakyat dalam hal ini telah dilihat sebagai kekuatan yang perlu ditundukkan demi cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan-perbedaan, sebagai basis kekuatan sosial, bukan saja dihilangkan tetapi diperangi sebagai suatu kesalahan. Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) telah dilakukan secara nasional untuk menyamakan persepsi dalam melihat diri setiap orang dan kelompok dalam suatu kerangka yang lebih luas. Butir-butir Pancasila yang berjumlah 45 itu berisi nilai peleburan individualitas ke dalam generalitas sebagai sebuah bangsa yang satu. Konseptualisasi negara tentang keberadaan budaya Indonesia yang beragam ini menemukan wujudnya dalam berbagai praktek kebijakan yang menyangkut berbagai keragaman budaya, seperti dalam etnis, bahasa, agama, kesenian, dan adat istiadat.

Keberadaan berbagai etnis yang berjumlah lebih dari 500 itu dapat menjadi gambaran tentang kompleksitas kebudayaan yang ada di Indonesia. Persebaran etnis dalam wilayah geografis yang luas di seluruh Indonesia menjelaskan kesulitan komunikasi yang luar biasa yang dihadapi dalam berbagai proses sosial dan politik. Perbedaan etnis semacam ini menunjukkan cara pandang yang berbeda dalam berbagai hal; memperlihatkan berlakunya sistem nilai yang berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok lain; dan menegaskan adanya tingkah laku sosial, ekonomi dan politik yang berbeda juga. Keragaman etnis semacam ini telah dikesampingkan karena dinilai menjadi faktor penghambat integrasi dan karenanya menjadi penghambat pembangunan yang menjadi satu-satunya ideologi yang sah bagi Orde Baru (Soedjatmoko, 1983).

Beberapa kecenderungan dapat ditemukan dalam politik penataan etnis ini, khususnya dari proses eksklusif dan inklusif sosial etnis tertentu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa etnis mayoritas

mendapatkan privelese-privelese dalam berbagai bentuk, sementara etnis yang tidak memiliki back-up mengalami marginalisasi. Orang Jawa telah mendapatkan privelese pemerintah dalam program transmigrasi atau orang Madura telah mendapatkan privelese di Kalimantan. Pembagian sumber daya dalam berbagai bentuk mengikuti garis etnis atau garis agama yang muncul dalam berbagai bentuk. Demikian pula ethnic cleansing telah terjadi dalam berbagai peristiwa di Kalimantan, Aceh, maupun di Riau. Sejalan dengan ini Parsudi Suparlan mengatakan:

”Penyeragaman kebudayaan-kebudayaan sukubangsa di daerah-daerah telah dilakukan antara lain dengan menyudutkan kebudayaan-kebudayaan tersebut sebagai terbelakang dan harus di-Indonesiakan. Peng-Indonesia-an dilakukan dengan cara penataran P4..., yang dilakukan oleh Dep. Sosial R.I.” (Suparlan, 2000: 44).

Proses serupa terjadi pada suku-suku lain yang tersebar di berbagai tempat yang dianggap masih terasing, seperti Kubu, Badui, Sakai, dll. Proses pengembangan suku-suku itu bukan sekadar memodernkan mereka dengan mengubah gaya hidup, tetapi juga

menghilangkan sifat dan karakter dasar dari etnis yang bersangkutan sehingga melahirkan resistensi dari etnis yang bersangkutan.

Contoh lain dapat ditemukan pada kebijakan yang terkait dengan bahasa, yang pada saat bahasa nasional diberlakukan maka berbagai bahasa lokal mengalami nasib yang sangat parah. Sebanyak kira-kira 512 bahasa telah diingkari sebagai suatu variasi dan diversifikasi ekspresi yang menyimpan perbedaan logika dalam berpikir. Bahasa di sini bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai kepribadian karena di dalam bahasa yang beragam itu tersimpan sopan santun dan tata kelakuan yang berbeda-beda. Bahasa yang kaya dengan ekspresi budaya ini mengalami kemunduran dalam jumlah penuturnya karena pengaruh bahasa Indonesia yang begitu kuat, dan karena penyempitan ruang bahasa yang tidak memungkinkan penggunaan bahasa terjadi.

Sekolah dalam hal ini merupakan instrumen politik yang signifikan yang menjauhkan generasi muda dari wilayah bahasa daerahnya, yang tidak hanya melalui bahasa resmi yang dipakai di sekolah tetapi

juga dalam buku-buku pelajaran yang harus dibaca. Kebijakan penggunaan bahasa nasional bersifat sepihak karena menafikan keberadaan bahasa daerah yang masih fungsional, dan dapat menjadi alat komunikasi alternatif dalam proses pembangunan. Bahasa yang berfungsi memperkaya bahasa nasional dan turut membentuk kepribadian bangsa itu telah mengalami nasib yang memprihatinkan karena tidak ada komitmen yang besar untuk memelihara pluralitas dalam bentuk-bentuk yang jelas (Rosjidi, 1999; Abdullah, 1999). Sebagian bahasa mulai kehilangan penuturnya atau mulai tidak digunakan.

Penataan keagamaan merupakan contoh lain yang signifikan untuk memperlihatkan bagaimana visi pemerintah tentang pluralisme budaya. Kesalahan yang fatal telah dilakukan akibat kesalahan pemahaman dan salah tata perbedaan agama ketika terjadi peralihan rezim Orde Lama ke Orde Baru. Untuk membendung pengaruh paham komunisme, negara telah memaksakan kehendaknya dengan mendorong warga negaranya untuk

memilih lima agama yang diakui di Indonesia. Dalam jangka waktu lebih dari 30 tahun, proses tersebut telah membendung dan telah membunuh berbagai agama-agama lokal yang potensial berkembang. Ketakutan akan dicap sebagai komunis telah menjadi faktor penting dalam tindakan

pemilihan agama dan perkembangan agama-agama suku. Keragaman agama dan kepercayaan di berbagai tempat di Indonesia telah diingkari yang kemudian berakibat punahnya agama-agama itu satu persatu.

Pada tingkat kepercayaan, di berbagai daerah dikenal Permalim, Pelbegu, Kaharingan, dll. yang tidak mendapatkan ruang ekspresi akibat kebijakan agama yang menekan adanya pluralitas. Pada saat kebijakan pengakuan atas lima agama diberlakukan, negara telah menggunakan agama untuk mengendalikan rakyatnya, sehingga rakyat menjadi terdiferensiasi dalam kelompok keagamaan dan melupakan kelompok kesukuan. Kuatnya pengaruh agama dalam hal ini bahkan telah menghancurkan berbagai jenis kebudayaan daerah. Kebudayaan Jawa yang sangat kaya

dengan berbagai aktivitas dan kebudayaan material perlahan-lahan berubah menjadi kebudayaan agama yang mengelompokkan masyarakat menjadi Jawa Islam atau Kristen (Abdullah dan Kutaneegara, 2002).

Pengelompokan agama semacam ini pun telah melahirkan pertikaian yang dipicu oleh berbagai faktor. Sejalan dengan itu Th. Sumartana mengatakan bahwa: "... sejarah sosial berabad-abad menunjukkan bahwa struktur internal dari agama-agama tersebut (baik institusi agama, kegiatan misi, dan kepemimpinan) telah melahirkan berbagai potensi konflik" (Sumartana, 2001: 79). Varian-varian dalam agama masih merupakan sumber pertikaian (seperti NU-Muhammadiyah atau Kristen-Katolik), seperti yang terjadi pada tingkat lokal di Mlangi, Yogyakarta:

"Masyarakat Mlangi menolak pluralisme yang ada dalam masyarakat mereka walaupun dalam kenyataannya masyarakat Mlangi memang plural. Dari segi agama, di sini ada Islam NU dan Islam Muhammadiyah, juga non-Muslim.... Penolakan ini terbukti dengan adanya upaya mereka untuk saling mengeksklusi.... Orang NU berupaya mengeksklusi orang Muhammadiyah. Orang Islam berupaya mengeksklusi

orang non-Muslim" (Arrani, 2002: 159-160).

Konflik yang bersumber pada agama ini terjadi pada berbagai tingkat, baik di dalam agama itu sendiri maupun antara satu agama dengan agama lain. Namun demikian, dinamika sosial yang diperlihatkan melalui agama ini tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan berbagai parameter lainnya. Pengelolaan keragaman budaya dengan cara yang serupa dapat juga dilihat pada ekspresi budaya berbagai etnis yang mengalami tekanan yang sangat kuat dari negara. Berbagai jenis tarian dari berbagai suku bangsa marginal (terutama Cina) telah dipasung. Kasus perijinan pementasan seni dan budaya di tahun 1980-an dan 1990-an menegaskan banyak hal tentang bagaimana gerakan budaya dibaca oleh pemerintah. Kesadaran tentang hak kebudayaan lokal dan etnik baru berubah dalam batas-batas tertentu ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden dengan diberikannya kebebasan kepada etnik Cina untuk memeluk Konghucu dan mengembangkan tari-tarian Cina. Pementasan kesenian Cina pun kemudian mulai berlangsung.

Secara perlahan-lahan dalam bidang seni pun lahir citra tentang tari Bali yang agung yang pengakuan negara terhadap tari itu telah menyebabkan tari-tari dari daerah lain menjadi kurang diperhatikan. Tari Bali kemudian sering mewakili tari-tari lainnya dalam berbagai festival dan kesempatan baik nasional maupun internasional, sementara tari-tari pinggiran kurang diperhitungkan dan hanya mendapat tempat pada kelompoknya sendiri-sendiri.

Perubahan pranata sosial di berbagai tempat yang dilakukan oleh pemerintah memperlihatkan hal yang serupa, yakni tentang bagaimana nilai-nilai homogenitas itu diutamakan dan didorong sebagai kenyataan sosial di Indonesia. Pada saat restrukturasi sistem pemerintahan terjadi, desa diterapkan sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan pada tingkat lokal. Penerapan konsep desa di seluruh Indonesia kemudian mengharuskan adanya adaptasi yang luar biasa rumit di sejumlah daerah. Sumatera Barat harus mengubah sistem nagari ke sistem desa yang melahirkan resistensi dan implikasi sosial budaya

dan politik yang pelik. Sistem desa juga mendapat respons dari masyarakat Aceh yang bersandar pada sistem mukim sebagai unit pengaturan sosial politik pedesaan.

Di Jawa sendiri sejumlah desa mengalami penggabungan untuk menjalankan sistem pemerintahan yang kompatibel di seluruh negeri. Proses perubahan semacam ini juga mempermudah penetrasi negara dan pasar ke dalam masyarakat desa yang pada gilirannya mengubah secara mendasar pranata sosial pedesaan. Program-program pemerintah dalam pembangunan pertanian, misalnya, telah mengubah hubungan kerja dan pranata sosial yang terkait dengan akses penduduk atas sumber-sumber daya lokal. Di Jawa misalnya, *bawon* yang berorientasi komunal kemudian berubah dengan sistem upah sejalan dengan berlakunya sistem tebasan dalam proses pemanenan. Penetrasi pasar melengkapi perubahan ini melalui proses komersialisasi yang berlangsung secara intensif dalam ekonomi pedesaan. Bukan hanya status ekonomi penduduk berubah, berbagai pola hubungan sosial dan konsep status mengalami redefinisi

yang mengharuskan adaptasi secara signifikan. Sifat dan bentuk pranata lokal mengalami pergeseran yang diakibatkan oleh tekanan yang begitu kuat yang datang dari luar (lihat, misalnya, Hart, 1989).

Proses penyatuan dan penyeragaman kebudayaan di Indonesia kemudian berimplikasi pada lahirnya pola hubungan sosial dan nilai-nilai baru dalam masyarakat yang menjadi dasar dari lahirnya berbagai persoalan sosial. Kebhinnekatunggalikaan telah melahirkan suatu politik budaya yang represif yang melahirkan berbagai bentuk resistensi dan konflik yang laten. Persoalan itu muncul akibat penataan ruang politik yang disusun dalam pengelolaan budaya yang bersifat majemuk.

IV. RUANG POLITIK KEBHINEKAAN DI INDONESIA

Proses nasionalisasi yang terjadi telah menyebabkan pengabaian terhadap keberadaan kebudayaan yang beragam, baik berupa budaya materi yang begitu kaya di berbagai tempat, institusi-institusi lokal yang berfungsi dengan

baik sebagai bagian dari kemampuan penataan sosial, maupun ideologi dan nilai-nilai yang mengandung kearifan lokal. Dengan cara ini pemerintah bukan saja gagal menemukan kebudayaan nasional, tetapi juga telah melahirkan resistensi yang sangat besar dari berbagai daerah. Konflik di berbagai tempat sesungguhnya merupakan bentuk resistensi masyarakat terhadap berbagai tindakan kebijakan pusat. Resistensi ini bagaimanapun turut menyumbangkan pada proses reformasi sistem pemerintahan dewasa ini dengan memberi ruang yang lebih besar untuk demokrasi dan pembagian kekuasaan serta sumberdaya. Namun demikian, perubahan sistem pemerintahan itu akan gagal jika hakekat keragaman kebudayaan itu tidak dipahami dengan baik. Dari analisis tentang keberadaan etnis, bahasa, agama, dan pranata sosial yang memperlihatkan keragaman budaya dengan segala dinamikanya, dapat dipelajari tiga proses penting yang telah terjadi di Indonesia yang telah menentukan situasi dan kondisi Indonesia dewasa ini.

Pertama, pengingkaran atas status kebudayaan yang beragam itu yang terjadi dalam berbagai bentuk dan kemudian melahirkan berbagai persoalan yang menjauhkan Indonesia dari sifat *bhinneka tunggal ika* tersebut. Kebudayaan yang tersebar di berbagai tempat tidak mendapatkan pengakuan dan berada dalam posisi yang tidak diperhitungkan. Hal ini diakibatkan oleh ideologi pembangunan yang mementingkan homogenitas dan dengan prakondisi itu dianggap pembangunan akan berlangsung dengan baik. Namun, pengingkaran keragaman budaya telah menghasilkan beban tambahan untuk pembangunan itu sendiri, khususnya mengakibatkan terganggunya stabilitas politik dalam bentuk kerusuhan dan berbagai konflik.

Fakta pengingkaran kebudayaan daerah pada masa Orde Baru terjadi sebagai akibat proses sentralisasi yang berlebihan. Pengingkaran tentang adanya budaya daerah dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Pengingkaran terjadi dalam bentuk tidak adanya status yang jelas untuk kebudayaan daerah/lokal dalam berbagai dimensinya. Apakah

budaya daerah dapat dianggap sebagai sumber hukum dan sumber dalam pembentukan tatanan sosial dan politik maupun ekonomi suatu daerah, masih menjadi sesuatu yang tidak terdefiniskan. Organisasi ekonomi yang dulunya dijiwai oleh semangat komunal dan juga pengaturan akses yang berbasis komunal, misalnya, apakah dapat menjadi sumber nilai dan aura bagi pembentukan sistem ekonomi daerah, tentu saja belum menjadi bahan perdebatan. Hal ini paling tidak mengembalikan kita pada diskusi ekonomi kerakyatan yang dalam pikiran Bung Hatta menjadi pilar penting membangun Indonesia.

Demikian pula dalam hak untuk hidup bagi kebudayaan daerah. Berbagai bentuk ekspresi kebudayaan daerah sesungguhnya berada dalam taraf *survival* atau bahkan cenderung punah karena tidak memiliki hak yang jelas untuk hidup, terutama karena proses marginalisasi yang terjadi secara sistematis. Bahasa daerah sebagian besar sedang mengalami kepunahan, demikian juga pranata sosial lokal yang telah berfungsi menjamin akses dan keberadaan individu dan

kelompok menghilang begitu saja tanpa ada usaha pelestarian yang sistematis. Iklim yang terbangun dalam era nasionalisasi dan globalisasi dewasa ini telah dengan sangat kuat menekan keberadaan budaya daerah sehingga daya pengaruh, apalagi daya paksa kebudayaan sudah mengalami pelemahan secara signifikan. Dalam bentuk yang sama kekuatan kebudayaan sebagai pengendali sosial yang didasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku telah pula melemah. Otoritas orang tua sebagai pusat orientasi, seperti juga pemimpin informal, telah melemah dan telah digantikan oleh pusat-pusat kekuatan baru yang lebih formal. Fakta ini kemudian menunjukkan tidak terlibatnya kekuatan sosial budaya dalam penataan sosial pada berbagai tingkat, sehingga ciri sistem sosial dan struktur sosial yang terbentuk memiliki orientasi yang berubah, terutama pada otoritas negara dan pasar.

Kesulitan lain yang dihadapi kebudayaan daerah adalah, ia harus mengalami akibat-akibat sampingan dari adanya gerakan modernisasi yang dibawa oleh negara dan pasar

dalam berbagai bentuk. Kebudayaan harus menerima akibat-akibat dan bahkan harus ikut menanggung semua biaya yang diakibatkan oleh modernisasi dalam berbagai bentuk. Biaya kultural yang harus dipikul atas masuknya teknologi telah menjadi cerita usang tentang adaptasi yang harus dilakukan oleh kebudayaan setempat. Dan berbagai bentuk penjelasan kultural dan penanganan kultural harus dilakukan sebagai cara yang tersedia untuk merespons berbagai persoalan, yang ditimbulkan sejalan dengan proses perubahan sistem politik dan ekonomi yang berlangsung begitu cepat. Kedua, politik uniformitas yang bertolak belakang dari keanekaragaman budaya karena penyeragaman terjadi pada skala yang sangat luas dan pada tingkatan yang bervariasi. Politik ini telah menyebabkan adanya suatu persepsi yang sama tentang pengelolaan kehidupan negara bangsa dan dalam berbagai tingkah laku sosial yang dicapai melalui berbagai proses pendidikan dan pelatihan. Media telah berfungsi dengan baik dalam proses semacam ini yang kekuasaannya berada di bawah

kendali pemerintah. Uniformitas ini juga tampak pada tataran nilai, dimana berbagai kelompok masyarakat diharapkan untuk membagi nilai yang sama dalam kehidupan sosial dan politik. Ukuran-ukuran ditentukan oleh negara yang kemudian menegaskan mana yang boleh dan tidak boleh. Tingkah laku sosial dan politik pun mengikuti cara yang sama dalam pemilihan partai atau dalam seluruh proses kepemimpinan, mengikuti prinsip yang ditentukan secara langsung dari pusat dan menafikan variasi-variasi lokal. Kebijakan pemerintah tentu saja berlaku umum dari pusat sampai ke daerah tanpa memperhitungkan variasi dan diversifikasi budaya yang begitu besar. Reaksi terhadap politik uniformitas ini sekarang muncul, misalnya, dengan resistensi di berbagai tempat melalui usaha-usaha memberlakukan syariah Islam dan prinsip-prinsip lokal dalam penataan sosial.

Proses standardisasi yang dilakukan dalam kehidupan sosial politik telah melampaui batas-batas toleransi kultural, karena tindakan itu bukan lagi merupakan proses

penyadaran etnis sebagai bagian dari satu kesatuan sistem sosial yang lebih besar dengan identitas bersama, tetapi sudah sampai pada pengingkaran eksistensi dan identitas kultural etnis. Nasionalisasi yang berlebihan telah menafikan eksistensi nilai-nilai dan pranata sosial lokal. Tokoh adat kehilangan peran dan legitimasi, institusi lokal telah digantikan dengan sistem organisasi yang standar yang dibentuk pemerintah, sehingga melahirkan tekanan kultural yang dahsyat. Chairil Effendi, seorang aktivis di Singkawang, pernah mengatakan bahwa pemerintah cenderung menutup ruang bagi kebebasan budaya lokal untuk berkembang sehingga nyaris punah. Krisis identitas dan keterasingan budaya ini katanya menimbulkan frustrasi yang mendalam bagi penduduk lokal (Kompas, 11/4/1999).

Tekanan-tekanan struktural semacam ini telah melahirkan gerakan tandingan atau resistensi budaya yang akhir-akhir ini mengejawantah (manifest) dalam bentuk pertikaian. Pertikaian etnis di sini lebih merupakan protes sosial etnis terhadap dominasi pusat.

Pertikaian kemudian menjadi alat politik etnis dalam menuntut terbukanya ruang kultural yang lebih luas, sehingga eksistensi kultural etnis mendapatkan pengakuan (lihat Jack Eller, 1999). Orang Dayak dalam konteks ini bukan memiliki persoalan kultural dengan orang Madura, tetapi memiliki persoalan dengan pendekatan pemerintah yang terlalu represif dan mengingkari kedayakan dengan segala identitas kulturalnya.

Ketiga, kegagalan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antar kelompok dalam masyarakat. Keseimbangan hubungan antar etnis memang tidak mungkin dicapai karena posisi ekonomi dan politik satu etnis dengan etnis lain sejak awal sudah berbeda. Masalah muncul ketika perbedaan itu semakin mencolok dan melahirkan ketimpangan dalam penguasaan sumber daya. Etnis pendatang seringkali menjadi etnis yang lebih dominan dalam penguasaan sumber daya, walaupun dari sudut jumlah mereka tergolong minoritas. Ketimpangan penguasaan sumber daya ini kemudian meluas ke dalam ketimpangan akses politik yang

menyebabkan lahirnya dominasi suatu etnis. Dua hal yang berbahaya di sini adalah ketika kelompok etnis dominan mendapatkan privilese dari berbagi agen sosial, khususnya pemerintah. Ketika kesadaran tentang batas-batas budaya (*cultural boundaries*) mulai muncul, etnis setempat mulai sadar bahwa wilayah itu merupakan tanah air mereka yang mulai dijajah oleh orang luar.

Dalam proses ini kelompok etnis yang mengalami subordinasi memiliki kesadaran kelompok dan identitas yang lebih besar dan mulai memperhitungkan batas-batas etnisitasnya. Penolakan masyarakat Dayak terhadap Madura dan menuntut mereka untuk meninggalkan wilayah Dayak (Kompas, 26/2/2001) dapat dilihat sebagai usaha mengembalikan *cultural boundary* itu pada batas-batas fisik dan geografis yang jelas. Pengusiran orang Jawa dari Aceh, dari Timor Timur atau dari Papua merupakan bukti kongkret gerakan kultural ini. Pertikaian di sini bukan disebabkan oleh perbedaan budaya dua etnis itu, tetapi oleh suatu sistem sosial politik yang tidak mampu menjamin keseimbangan kekuasaan

ekonomi dan politik antar etnis. Pemerintah dalam hal ini gagal memainkan dua peran: gagal dalam mengendalikan dominasi etnis tertentu dalam penguasaan sumber daya yang seharusnya sangat perlu dilakukan melalui serangkaian kebijakan; dan gagal dalam meningkatkan human capital dan menjamin akses kelompok subordinat terhadap public goods. Memecahkan pertikaian dengan pendekatan semacam ini, membutuhkan redefinisi sistem politik secara mendasar, khususnya menyangkut kacamata politik baru dalam melihat perbedaan etnis.

Ketiga faktor di atas menegaskan bahwa konflik-konflik yang terjadi di Indonesia selama ini bukan semata-mata persoalan perbedaan budaya etnis, tetapi sudah lebih mengakar sebagai kesalahan berbagai pihak dalam mengelola perbedaan dan konflik itu sendiri. Edward Azar menegaskan faktor pengingkaran kepentingan identitas kelompok sebagai faktor sentral dalam pertikaian etnis (lihat H. Starr, 1999), yang kemudian membentuk kesadaran kelompok yang berlebihan dan eksklusi sosial. Kalau proses ini

terjadi berkepanjangan dan menyebabkan konflik yang berlarut-larut maka apa yang terjadi di Yugoslavia patut dikaji. Konflik di daerah Balkan ini dimulai pada awal tahun 1980-an, saat protes-protes mulai terjadi di daerah ini, pada saat Yugoslavia masih terdiri dari Slovenia, Croatia, Bosnia, Vojvodina, Serbia, Montenegro, dan Macedonia, yang merupakan daerah bekas jajahan Turki. Pertikaian etnis di wilayah ini telah menghancurkan kesatuan dan akhirnya terpecah-belah pada tahun 1991. Pengalaman Yugoslavia merupakan pengalaman paling pahit jika dibandingkan dua kasus lain di Eropa Timur, Uni Soviet dan Cekoslovakia.

V. JALAN PANJANG PENATAAN PERSATUAN DALAM KEBHINEKAAN

Perubahan yang terjadi di Indonesia selama setengah abad ini sesungguhnya telah membawa masyarakat ke arah yang penuh dengan fragmentasi dan kohesi sekaligus. Perubahan awal ditandai dengan tumbuhnya kelas menengah baru yang muncul dari berbagai latar belakang sosial. Sebagian kelompok

ini memiliki orientasi agama atau etnis, seperti tumbuhnya kaum kapitalis lokal yang berorientasi agama dalam kasus pengusaha santri di Jawa atau kaum Cina yang melakukan ekspansi dagang, demikian juga pedagang-pedagang Minang yang berkembang di berbagai tempat. Sebagian yang lain memang tumbuh melewati batas-batas daerah dan etnis akibat mobilitas sosial ke berbagai tempat dan masuk ke dalam sektor-sektor pekerjaan. Profesi mempertemukan perbedaan-perbedaan ini yang memungkinkan kohesi sosial terbentuk.

Proses pembangunan yang berlangsung membentuk suatu mode produksi baru di mana tidak hanya memungkinkan pertemuan dan pencampuran berbagai etnis yang didasarkan pada kegiatan ekonomi yang sama, tetapi juga terbentuknya pemukiman yang berisi anggota dari latar belakang etnis, bahasa, dan agama yang beragam. Dalam lingkungan semacam ini komunitas baru terbentuk di luar batas-batas budaya (*cultural boundaries*) mereka dan membangun satu sejarah baru dalam hidup bersama.

Kelompok yang hidup di luar wilayah kebudayaan masing-masing ini merupakan orang-orang yang kemudian mengembangkan suatu sistem nilai yang berbeda dengan sistem nilai lama yang tampak dari orientasi nilai yang lebih terbuka (*open minded*), mudah beradaptasi dan mengadopsi sistem nilai baru dan kemudian memiliki gaya hidup yang berbeda dengan sebelumnya. Kelompok ini juga yang kemudian memiliki kesadaran baru melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Gerakan sipil di Indonesia kemudian lahir akibat adanya kelas menengah yang mobile dan berorientasi ke luar dari batas-batas budayanya ini. Sebagian gerakan sipil itu memang mereproduksi agama yang menunjukkan fragmentasi dalam berbagai bentuk karena kelompok semacam ini mempertanyakan keabsahan-keabsahan yang berlaku. Sebagian yang lain lebih general dengan berorientasi pada pembentukan masyarakat yang lebih terbuka dan maju.

Pada saat yang sama tumbuh minat dan bakat yang luar biasa dalam bidang pendidikan, hal ini

sejalan dengan ekspansi bidang pendidikan yang dilakukan oleh berbagai organisasi sosial keagamaan, lembaga pemerintah, dan pasar. Tidak hanya sekolah-sekolah formal yang lahir, tetapi juga kursus-kursus dalam berbagai bentuknya membuka ruang sosial yang begitu luas bagi pertemuan kebudayaan yang beragam. Orientasi kehidupan lebih kepada nilai-nilai kepentingan individual menjadi dasar dari lahirnya komunitas terbayang seperti dikatakan Anderson (1991), yang keterlibatan anggotanya ke dalam komunitas lebih bersifat simbolis ketimbang emosional. Lahirnya masyarakat kota yang begitu pesat merupakan pembuktian tentang lepasnya keterlibatan personal individu dengan komunitas asalnya, yang kemudian membangun dunia bayangan dengan mereproduksi simbol-simbol budaya untuk menegaskan nilai-nilai otentik dari identitas individu.

Dalam konteks perubahan seperti dipaparkan di atas, proses penciptaan masyarakat dan sistem sosial yang *bhinneka tunggal ika* itu mengalami banyak kesulitan karena konsep "satu" atau kesatuan dalam

"*bhinneka tunggal ika*" menunjuk pada sesuatu yang tidak terdefinisikan dengan jelas, karena sejauh ini istilah "satu" itu lebih merupakan definisi politik yang diartikan dengan asas tunggal: bahasa yang satu dan orientasi nilai yang satu dan tentu saja tunduk pada satu pusat. Proses politik ini telah mengalami kegagalan karena pendefinisian secara lebih substansial tentang makna kesatuan itu tidak mendapatkan basis ekspresinya dan tidak terkomunikasikan dengan baik.

Untuk merespons cita-cita persatuan semacam ini, Parsudi Suparlan mengatakan bahwa *bhinneka tunggal ika* itu hanya dapat berlangsung dengan empat syarat, yakni harus didasarkan pada pembentukan masyarakat sipil, adanya demokrasi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memperlakukan hak satu dengan yang lain secara sama, dan harus ada penegakan hukum untuk menjamin keteraturan (Suparlan, 2000: 48). Syarat yang diberikan Parsudi sungguh suatu syarat yang berat untuk dilaksanakan, karena keempat hal itu justru menjadi bagian yang mengalami kerusakan

yang paling parah di negeri ini. Mungkin kita harus menunggu cukup lama untuk dapat melihat tumbuhnya kekuatan masyarakat sipil, terbentuknya sistem yang demokratis dan adil, serta menikmati adanya jaminan hukum di Indonesia. Sebelum semua itu dapat terjadi, kita telah kehilangan kekuatan untuk mewujudkannya karena pengingkaran terhadap keragaman budaya yang terus menerus telah melahirkan kerapuhan yang fundamental bagi pencapaian komitmen bersama dalam kerangka nilai yang lebih luas.

VI. PENUTUP

Bhinneka Tunggal Ika, sebagai kondisi riil kebangsaan Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, yang telah dikuatkan dengan ikrar bersama/sumpah pemuda pada tahun 1928, untuk menjadi satu bangsa yang bersatu dan berdaulat dalam suatu Negara. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia setiap penyimpangan terhadap eksistensi 4 Pilar Negara tersebut akan menimbulkan konflik yang

berdampak besar terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kehidupan negara pada prinsipnya sama dengan kehidupan keluarga. Kedaulatan rakyat memberi gambaran, bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam setiap kehidupannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut akan terlihat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Indonesia akan tergambarkan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Kebinnekaan dan kedaulatan akan berjalan seiring dan seirama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Musuh utamanya adalah ketidakadilan sosial. Ketika ia dihadapkan pada ketimpangan dan ketidakadilan, maka ia akan menjelma menjadi kerusakan sosial. Maka yang diperlukan dalam meringkai situasi ini adalah koordinasi sosial atau kekuasaan, pembagian kerja, dan distribusi barang. Ketiga hal ini menjadi penting dalam memberikan perlindungan kepada warganya dan

memelihara kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk tunduk dan mentaati kekuasaan yang berlaku. Ketika hubungan timbal balik ini tidak berjalan dengan harmonis maka yang muncul adalah perlawanan politik rakyat terhadap kekuasaan yang tidak lagi memenuhi kewajiban-kewajiban moralnya yang mendasar.

Tantangan bangsa sekarang ini jauh lebih sulit dan rumit daripada sebelum-sebelumnya. Dampak dari proses globalisasi dan neoliberalisme sudah makin nyata dari hari kehari, yaitu adanya proses marjinalisasi yang lebih efektif, sistematis dan struktural, sehingga meningkatkan jumlah kemiskinan dan pengangguran. Diperlukan semangat kebangsaan yang tidak picik, tetapi yang mampu menjadi dasar bagi manusia manusia Indonesia yang selalu optimis dalam bermimpi Indonesia masa depan.

Indonesia harus beralih dari produksi dan konsumsi, untuk kemudian mengutamakan pembangunan sosial dan manusia yang lebih berimbang dan merata, dengan tolak ukur kemajuan dan

kesejahteraan penduduk, atau bahkan mungkin tolak ukur kebahagiaan, lebih memberi arti bagi kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan di planet ini. Sebagian gagasan Jokowi sejalan dengan tujuan itu dan kita bisa berharap, di bawah kepresidenannya, Indonesia kelak bisa menjadi salah satu negara yang patut dicontoh. Bisa dibayangkan, selalu ada kemungkinan, dengan kejernihan akal dan keberanian politik yang diperlukan, untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial seberapa pun kritisnya. Untuk itu, seperti kata-kata bijak dari pemikir revolusioner terkemuka Italia, Antonio Gramsci, kita harus terus memelihara “pesimisme akal dan optimisme kemauan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 1999. “Dari Bounded System ke Borderless Society: Krisis Metode Antropologi dalam Memahami Masyarakat Masa Kini”, Antropologi Indonesia, Vol. 60, hal. 11-18.
- . 2001. “Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan: Pemecahan Konflik Etnis di Indonesia”, Antropologi Indonesia, Vol. 25, No. 66.

- Abdullah, Irwan dan Pande Made Kutanegara. 2002. "Diversitas Budaya, Hak Budaya Daerah dan Governansi Lokal di Indonesia", Makalah yang disampaikan dalam the 3rd International Conference of the Journal Antropologi Indonesia, Bali, 16-19 Juli.
- Anderson, Ben. 1991. *Imagined Communities*. Verso, London.
- Arrani, Amirudin. 2002. "Mlangi: Pluralitas, Konflik, Resistensi", dalam M. Jadul Maula (ed.), *Ngesuhi deso Sak kukuban: Lokalitas, Pluralisme, Modal Sosial Demokrasi*. LkiS, Yogyakarta.
- Chua Beng Huat. 2002. "Multiculturalism in Island South-East Asian", Keynote address pada the 3rd International Conference of the Journal Antropologi Indonesia, Bali, 16-19 Juli.
- Eller, J. 1999. *From Culture to Ethnicity to Conflict*, The University of Michigan Press, Ann Arbor.
- Govers, Cora dan Hans Vermeulen. 1997. *The Politics of Ethnic Consciousness*. MacMilland Press, New York.
- Hart, Gill et al. (ed.). 1989. *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia*. University of California Press, Berkeley.
- Madinier, Remy. 2017. *Revolusi Tak Kunjung Selesai Potret Indonesia Masa Kini*. KPG (Kepustakaan Popilar Gramedia) IRASEC (Institut de rechercher sur l'Asie su Sud-Est Contemporaine)
- Rosjidi, Ajip. 1999. *Pemetaan Bahasa Nusantara*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Soedjatmoko. 1983. "Ilmu-ilmu Kemanusiaan dan Masalah pembangunan", dalam *Masyarakat dan Kebudayaan*. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Starr, H. 1999. *The Understanding and Management Global Violence*, MacMillan, London.
- Sumartana, Th. 2001. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Interfidei, Yogyakarta.
- Suparlan, Parsudi. 2000. "Masyarakat Majemuk dan Perawatannya", dalam *Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia I, Makasar*.